

Komunikasi Politik Tokoh Agama Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 (Study Ustadz Abdul Somad)

Ivan Sunata

Institut Agama Islam Negeri Kerinci
sunataivan@gmail.com

Ahmad Khairul Nuzuli

Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Ahmad.nuzul@gmail.com

Muhammad Munir

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Muniralafasy39@gmail.com

Abstract.

This research broadly aims to reveal the role of ulama as political communicators and specifically to reveal the involvement of Ustadz Abdul Somad (UAS) in the perspective of political communication in the 2020 Pilkada. The results show that of the three kinds of political communicators, Ustadz Abdul Somad (UAS) falls into the third, namely the spokesperson and opinion leader. Because the goal is not to gain a position, but to provide support because of the same vision, mission and goals. UAS is also a highly charismatic person in the community, so it is believed to be able to move people to make political choices in the political contestation in the 2020 Pilkada. The political messages conveyed by UAS in the 2020 Pilkada are as follows: a) Politics is part of community education, b) Politics is a means to apply da'wah, c) Resist political pressure, d) Reject money politics.

Keyword: *Political Communication, Abdul Somad, Election*

Abstrak

Penelitian ini secara luas bertujuan untuk mengungkapkan peran ulama sebagai komunikator politik dan secara khusus mengungkapkan keterlibatan Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam perspektif komunikasi politik pada Pilkada 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga macam komunikator politik, Ustadz Abdul Somad (UAS) masuk pada kategori ketiga, yaitu juru bicara sekaligus pemimpin pendapat. Karena tujuannya bukan untuk meraih jabatan, namun memberikan dukungan karena adanya kesamaan visi misi dan tujuan. UAS juga orang yang mempunyai kharismatik yang tinggi di tengah masyarakat, sehingga diyakini mampu menggerakkan masyarakat untuk menentukan pilihan politik dalam konstestasi politik pada Pilkada 2020. Adapun pesan-pesan politik yang disampaikan oleh UAS pada Pilkada 2020 adalah sebagai berikut: a) Politik adalah bagian dari pendidikan umat, b) Politik merupakan sarana untuk mengaplikasikan dakwah, c) Lawan tekanan politik, d) Tolak politik uang.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Abdul Somad, Pilkada

Pendahuluan

Nama Ustadz Abdul Somad sempat viral di media sosial twitter pada tanggal 10-12-2020, pasalnya Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Medan yang didukungnya, Akhyar dan Salman kalah dari Bobby dan Aulia.

Berdasarkan hasil *quick count* yang dilakukan tiga lembaga survei, perolehan suara Akhyar dan Salman terpaut cukup jauh dibanding rivalnya Bobby dan Aulia.

Pertama, hasil survei Charta Politika pasangan Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi meraih 44,71 persen suara. Sedangkan Bobby Nasution dan Aulia Rachman berhasil unggul dengan jumlah suara sebesar 55,29 persen. *Kedua* survei Poltracking, pasangan Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi mendulang 45,88 persen suara. Sedangkan Bobby Nasution dan Aulia Rachman berhasil unggul dengan jumlah suara sebesar 54,12 persen. *Ketiga* survei Voxpol Center, paslon Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi memperoleh 46,68 persen. Sedangkan Bobby Nasution dan Aulia Rachman unggul dengan jumlah suara sebesar 53,31 persen¹.

Atas dasar hasil hitung cepat tersebut, *netizen* beramai-ramai menyindir UAS karena keterlibatannya sebagai juru kampanye, tidak berhasil mendongkrak perolehan suara Akhyar dan Salman.

Beberapa pengamat, bahkan beranggapan bahwa UAS lebih baik menjaga netralitas pada pilkada 2020. Hal ini dikarenakan posisi UAS sebagai ulama, jika berpolitik praktis dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan di antara umat Islam, paling tidak di kalangan pendukung UAS sendiri. Atas polemik ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih tentang keterlibatan UAS pada Pilkada 2020 dalam perspektif komunikasi politik.

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang diamati². Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji data secara mendalam tentang semua kompleksitas yang ada dalam konteks penelitian tanpa memakai skema berpikir statistik. Esensinya, riset kualitatif bermaksud mengungkap arti terhadap fenomena perilaku kehidupan khalayak, baik dalam kapasitas

¹“Hasil Akhir Quick Count Pilkada Medan Oleh 3 Lembaga Survei,” Kompas.com, 2020.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

selaku pribadi, golongan ataupun masyarakat luas, yang berhubungan komunikasi politik dan keterlibatan dalam penentuan biasa³.

Hasil Dan Pembahasan

Komunikasi Politik

Hingga tahun 1976 telah ada sekitar 126 defenisi komunikasi⁴. Banyaknya defenisi komunikasi dipicu oleh banyak para sarjana yang tertarik mempelajari ilmu komunikasi. Di samping itu, perbedaan latar belakang keilmuan para ahli diduga ikut andil dalam terciptanya defenisi komunikasi yang beragam.

Secara bahasa, komunikasi bersumber dari bahasa latin yaitu *communis* yang maksudnya membuat ataupun menciptakan kebersamaan antara dua orang maupun lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam perkataan latin, yaitu *communication* yang berarti membagi.⁵

Menurut para ahli, seperti Harold Lasswell mengungkapkan salah satu defenisi komunikasi, yaitu “*Who says what in which channel to whom and with what effects* – Siapa mengatakan apa melalui saluran mana kepada siapa dan dengan pengaruh apa.”⁶ Sedangkan Wilbur Schramm mengartikan komunikasi sebagai “saling berbagi informasi, gagasan, atau sikap.”⁷

Penjelasan di atas memberikan kita pemahaman bahwa komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari satu individu ke individu lain dengan tujuan mempengaruhi atau setidaknya menciptakan kesamaan pengertian, persepsi hingga tingkah laku antara komunikator dan komunikan.

Sementara itu, dari aspek terminologipolitik berasal dari perkataan Yunani yakni *politeia*, atau *polis* yang berarti negara atau kota ⁸.Sedangkan secara istilah, pengertian politik sangat beragam. Menurut Abdulgani, perjuangan politik bukan senantiasa “*de kunst bet mogelijke*” tetapi juga “*de kunst van onmogelijke*” (politik merupakan seni mengenai

³(Susanto, 2013: 165)

⁴(Hafied Cangara, 2016: 20)

⁵(Hafied Cangara, 2016: 20)

⁶(Shahreza, 2018: 2-3)

⁷(Siagian, n.d.: 14)

⁸(Alfaqi, 2015: 112)

kemungkinan dan ketidakmungkinan). Politik terkadang juga dimaknai “*machtsvorming en machtsaanwending*” (politik merupakan pembangunan serta pemakaian kekuatan).⁹

Isjwara seperti dikutip oleh¹⁰ menulis sebagian makna mengenai politik dari beberapa pakar. Antara lain yakni Loewenstein yang beranggapan “Politik is nicht anderes als der kamps um die Macht” (politik tidak lain ialah perjuangan kekuasaan).

Komunikasi politik sebagaimana pendapat Alwi Dahlan ialah aspek ataupun disiplin yang mengkaji sikap serta aktivitas komunikasi yang bertabiat politik, memiliki dampak politik, ataupun mempengaruhi sikap politik.¹¹ Komunikasi politik selaku suatu kajian dengan salah satu objeknya menitikberatkan perspektif pesan-pesan politik, mempunyai peranan yang bisa digunakan oleh tiap orang dalam kehidupan politiknya. Kala kita berdialog perihal politik, paling tidak tampak dalam pikiran pada tiga hal, yaitu kewenangan, kepentingan, dan pengaturan.¹²

Secara asasi, setiap pegiat politik yang terjun ke dunia politik, memiliki niat untuk terlibataktif pada tiga hal tersebut. Dirinya ingin memiliki kekuasaan, seperti menjadi pejabat atau sebagai pembuat keputusan dalam satu sistem. Boleh jadi juga yang bersangkutan tidak menginginkan kekuasaan, tetapi mempunyai kebutuhan buat ikut serta dalam politik sebab memberikan arti baginya serta untuk grup dan banyak orang yang jadi tanggungjawabnya. Iajuga mempunyai peluang untuk berpartisipasi dalam merancang dan membuat peraturan serta memiliki kekuasaan dalam sebuah sistem politik.¹³

Ulama Sebagai Aktivist Komunikator Politik

Peran ulama sebagai komunikator politik dijelaskan oleh Mohd. Yusuf H. Abdullah dalam buku Komunikasi Politik karangan Haidir Fitra Siagian. Menurutnya ulama merupakan bagian komunikator politik dengan posisi sebagai *opinion leader* atau pemimpin pendapat¹⁴.

Keterlibatan ulama dalam kontestasi politik tidak terjadi pada Pilkada Tahun 2020 saja, pada Pemilihan Presiden RI Tahun 2019 misalnya, ulama-ulama yang tergabung dalam

⁹(Zawawi, 2015: 88)

¹⁰Zawawi (2015: 88)

¹¹(Cangara, 2011: 29)

¹²(Siagian, n.d.: 26)

¹³(Siagian, n.d.: 26)

¹⁴ Siagian.

Nahdlatul Wathon Pancor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mendukung pasangan calon Presiden 01 Jokowi-Ma'ruf¹⁵.

Dalam pembuatan pandangan khalayak, terdapat sebagian *schedule* politik yang sudah diselenggarakan oleh malim NW Pancor, yaitu: (1) Pengajian dalam rangka Silaturahmi Calon Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. (2) Kuliah Umum Kebangsaan. (3) Silaturahmi Perjuangan Nahdlatul Wathan 2019. (4) Kuliah Umum Lintas Generasi NW. (5) Pengajian Akbar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. (6) Deklarasi dan Kampanye Tuan Guru Untuk Jokowi-Ma'ruf¹⁶.

Di setiap acara tersebut, NW Pancor mem-*framing* masyarakat dengan keberhasilan-keberhasilan Jokowi membangun Indonesia terutama daerah Nusa Tenggara Barat. Keberhasilan tersebut antara lain, penetapan pesisir laut Mandalika Lombok selaku Kawasan Ekonomi Special (KEK), pembangunan sirkuit moto GP dikawasan Mandalika Lombok. Pada acara terakhir, NW Pancor bahkan membacakan deklarasi atau pernyataan sikap untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Apa yang dilakukan oleh Ulama-Ulama NW Pancor jelas merupakan sebuah aktivitas ulama sebagai komunikator politik.¹⁷ Siagian berpendapat terdapat tiga macam komunikator politik, yaitu:

"Pertama politisi, yaitu orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah, seperti aktivis partai politik, ahli-ahli parlemen, menteri, dan sebagainya. *Kedua* professional, yaitu orang yang menjadikan komunikasi sebagai nafkah/mata pencahariannya, baik di dalam maupun di luar politik, yang muncul akibat revolusi komunikasi: munculnya media massa lintas batas dan perkembangan sporadis media khusus (majalah internal, radio siaran, dan sebagainya) yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Terdiri dari jurnalis (wartawan, penulis) dan promotor (humas, jurubicara, juru kampanye, relawan, event organizing, dan lain-lain). *Ketiga* aktivis, (a) juru bicara (*spokesman*) bagi kepentingan organisasi, tidak memegang atau mencita-citakan jabatan pemerintahan, juga bukan profesional dalam komunikasi. Perannya mirip jurnalis. (b) pemimpin pendapat (*opinion leader*) yaitu orang yang sering dimintai petunjuk dan informasi oleh masyarakat; meneruskan informasi politik dari media massa kepada masyarakat. Misalnya tokoh informal masyarakat yang kharismatik, atau siapa pun yang dipercaya publik."

Dari ketiga jenis komunitor politik tersebut, penulis berpendapat bahwa ulama masuk pada kategori ketiga, yaitu juru bicara sekaligus pemimpin pendapat. Karena tujuan

¹⁵(Sofyan et al., 2020: 64)

¹⁶(Sofyan et al., 2020: 66-68)

¹⁷Siagian (n.d.)

mereka bukan untuk meraih jabatan, namun memberikan dukungan karena adanya kesamaan visi misi dan tujuan. Ulama juga orang yang mempunyai kharismatik yang tinggi di tengah masyarakat, sehingga diyakini mampu menggerakkan masyarakat untuk menentukan pilihan politik dalam konstestasi politik (pilkada, pileg, atau pilpres).

Komunikasi Politik Ustadz Abdul Somad Pada Pilkada Tahun 2020

Bagian Pendidikan Umat

Satu di antara beberapa alasan keterlibatan UAS sebagai tim kampanye pada Pilkada Serentak tahun 2020 adalah ingin memberikan pendidikan bagi umat. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan untuk umat oleh UAS yaitu “pengajaran kepada umat bahwa dakwah juga bisa dilakukan lewat kekuasaan dan politik.” UAS juga berkata “umat tidak hanya dididik shalatnya, tidak hanya dididik bagaimana baca quran tapi juga dididik bagaimana memilih, dan dalam demokrasi itu sesuatu yang biasa,”¹⁸.

Diskursus tentang hubungan dakwah dan kekuasaan di Indonesia sudah lama diperbincangkan, Abdillah sebagaimana dikutip¹⁹ mengatakan bahwa sebelum merebaknya fenomena terorisme, hubungan dakwah dan kekuasaan dapat diidentifikasi melalui klasifikasi gerakan Islam di Indonesia yaitu “Islam Politik”, “Islam Struktural” dan “Islam Kultural”. Menurut catatan Assyaukanie, tokoh Muslim seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid menekankan pentingnya Islam kultural. Sedangkan Deliar Noer menekankan pentingnya Islam politik dan perlunya partai politik Islam.²⁰

Bagi Abdillah, arah, aksi ataupun kegiatan Islam kultural melaksanakan pemasyarakatan serta institusionalisasi anutan Islam lewat upaya yang menitikberatkan pada perubahan kesadaran serta tingkah laku pemeluk atau warga tanpa keikutsertaan negara serta tanpa pergantian sistem nasional menjadi sistem yang Islami. Sebaliknya Islam struktural menekankan upaya-upaya ini lewat penetapan sistem nasional ataupun kebijakan publik yang Islami. Usaha struktural ini tidak saja dicoba lewat partai politik Islam, walaupun tentu saja mewajibkan terdapatnya *political will* dari para pengambil kebijakan publik.²¹

¹⁸Wahyu Sikumbang, “Dampingi Cawalkot Bukittinggi, Ustadz Abdul Somad: Ini Bagian Pendidikan Umat,” INewsSumbar.id, 2020, <https://sumbar.inews.id/berita/dampingi-cawalkot-bukittinggi-ustaz-abdul-somad-ini-bagian-pendidikan-umat/all>.

¹⁹Fikri (2017: 58)

²⁰Fikri.

²¹Fikri.

Aksi Islam Kultural kadangkala pula dibedakan dengan Islam Politik. Aksi Islam Kultural merupakan kegiatan pemeluk Islam buat mengikhtiarkan aspirasinya lewat aktivitas yang bertabat nonpolitik, semacam lewat organisasi, kegiatan dakwah, lembaga-lembaga sosial, dan serupanya selain partai politik. Sedangkan aksi Islam politik mengikhtiarkan harapan pemeluk Islam lewat partai politik Islam.²²

Berdasarkan hal di atas, dalam konteks Pilkada, UAS tentu saja tidak menaruh harapan hanya pada partai politik Islam saja, tetapi juga pada pasangan calon yang di dukung partai tersebut. Namun keduanya baik partai politik Islam ataupun Bupati, Wali Kota dan Gubernur yang diusung oleh partai politik Islam, bila memenangkan Pilkada bisa dimanfaatkan oleh UAS dan umat Islam untuk memperjuangkan program-program yang sebelumnya sudah didiskusikan dan dijanjikan dengan peserta pilkada yang mereka dukung.

Mengaplikasikan Ceramah

Dalam perspektif keilmuan dakwah, fungsi dakwah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: *al-taujib* atau pesan dakwah²³ dan *al-taghyir* atau misi perubahan masyarakat.²⁴ Dari sisi *al-taujib*, da'i menyampaikan ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas dan sebagainya. Penyampaian ajaran agama bisa dilakukan secara lisan, tulisan, tatap muka maupun bermedia seperti di radio, televisi, ataupun media sosial seperti youtube dan sebagainya. Sedangkan dari sisi *al-taghyir*, da'i tidak sekedar menyampaikan ajaran Islam tapi menjadi agen perubahan di tengah masyarakat yakni memajukan semua bidang kehidupan manusia. Da'i harus menjembatani manusia untuk mencapai kemajuan tersebut dengan memberikan tuntunan hidup yang praktis dan religius.

Hal ini lah yang kemudian memotivasi Ustadz Abdul Somad (UAS) terlibat langsung dalam Pilkada serentak tahun 2020. Seperti dikutip dari beberapa media massa, bahwa keterlibatan UAS dalam Pilkada kali ini sebagai langkah mengimplementasikan ceramahnya. "Mengaplikasikan ceramah saya selama ini, bahwa perbaikan pada tiga aspek yakni pendidikan, ekonomidan politik."²⁵

²²Fikri.

²³(Abdullah, 2019: 10)

²⁴(Abdullah, 2019: 12)

²⁵Banda Haruddin Tanjung, "Ustadz Abdul Somad Paparkan Alasan 'Turun Gunung' Dukung Calon Di Pilkada," okenewz, 2020, <https://news.okezone.com/read/2020/12/10/340/2325269/ustadz-abdul-somad-paparkan-alasan-turun-gunung-dukung-calon-di-pilkada>.

Seperti diketahui, UAS dalam ceramahnya sering membahas ketiga masalah yang disebutkan di atas. Di bidang ekonomi, UAS sering membahas dan memotivasi masyarakat hijrah dari bank konvensional ke bank syariah. Menurut hematnya bank syariah di Indonesia bisa menjadi bank besar karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Tentu saja syaratnya adalah umat Islam sendiri harus bersedia menggunakan produk bank syariah. Tapi menurutnya, bank syariah di Indonesia belum diminati oleh umat Islam sendiri, hal ini terjadi disebabkan beberapa faktor: *Pertama*, karena tidak ada *support* dari kekuasaan. *Kedua*, minimnya sosialisasi tentang bank syariah ke masyarakat.

“Bank konvensional di negeri muslim yang tidak sebanyak kita, bisa menjadi bank syariah, Islamik bank, maju berhasil. Saya heran, saya bodoh, nggak ngerti masalah ini. Saya tanyakan kepada yang pakar yang ngerti. Ustadz, doktor, kenapa di tempat kita tidak bisa maju?” “Ada dua sebab Ustadz Somad, yang pertama karena tidak ada support dari kekuasaan. Yang kedua, karena tidak ada iklan ke masyarakat. Tv tidak mau mengiklankan, yang paling celaknya ustadz yang tidak ngerti pun ngomong tidak benar tentang ekonomi Islam. Ah, sama aja nabung di bank konvensional dengan bank syariah. Paling-paling masuknya pakai *assalamu’alaikum*, paling-paling pegawainya pakai jilbab.”²⁶

Oleh karena itu untuk mewujudkan bank syariah, perlu adanya kerja sama antara ulama dan pemerintah. Ulama di satu sisi menyampaikan seluruh seluk beluk bank syariah kepada masyarakat, sedangkan pemimpin mendorong direksi-direksi bank konvensional untuk beralih ke sistem bank syariah.

Menurut penulis, inilah salah satu alasan yang mendorong UAS menjadi tim kampanye pada pilkada. Karena jika pasangan yang didukungnya memenangkan pilkada, UAS bisa menagih janji mereka untuk memajukan ekonomi kemasyarakatan, salah satunya pendirian bank syariah di daerah. Kolaborasi UAS dan umat Islam dengan Kepala Daerah yang tentu saja dapat mewujudkan visi kebangkitan ekonomi umat.

Masing-masing daerah, biasanya memiliki saham pada bank daerahnya. Sebagai pemegang saham, Kepala Daerah tentu saja bisa mendorong direksi bank daerah di tempatnya untuk beralih dari bank konvensional menjadi bank syariah. Selain itu, fungsi kepala daerah yang salah satunya adalah merumuskan dan mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) dinilai menjadi kekuatan yang melekat pada seorang Kepala Daerah. Dengan perda tersebut bisa mewajibkan lembaga keuangan mikro di wilayahnya menganut asas syariah.

²⁶(Pentingnya Ekonomi Islam dan Kontribusi Tazkia, 2019)

Lawan Tekanan Politik

Selain sebagai sarana pendidikan umat dan mengaplikasikan ceramah, Ustadz Abdul Somad mengatkaan, keterlibatannya pada Pilkada 2020 sebagai bentuk perjuangan/penolakannya terhadap tekanan-tekanan politik yang ia hadapi.

“Saya sudah menang sebelum pencoblosan, karena saya menang melawan godaan uang, mobil dan jabatan. Saya menang melawan diam cari selamat. Saya menang melawan pesan-pesan dari Jakarta.”²⁷

Tolak Politik Uang

Politik uang sudah lumrah terjadi pada pemilu dan acapkali tidak terjamah oleh penegakan hukum. Indikasi ini berlawanan dengan prinsip kejujuran serta bisa menyebabkan terpilihnya kepala daerah yang tidak andal.²⁸ Aspinall dan Sukmajati bahkan berpandangan bahwa politik uang sebagai *the mother of corruption* yaitu permasalahan utama yang paling sering terjadi di Indonesia.²⁹ Dalam haluan Islam, politik uang bisa dikiaskan dengan aksi suap atau sogok alias risywah yakni sesuatu pemberian dalam wujud hadiah yang diserahkan pada orang lain dengan menginginkan balasan khusus yang berharga lebih besar. Risywah dilarang dalam agama Islam, larangan ini sudah diturunkan Allah semenjak era awal kenabian Muhammad Saw berbarengan dengan larangan melaksanakan praktik pemujaan kepada berhala. Al-Qur’an mengatakan beberapa kali masalah keharaman suap atau sogok ini yang didukung pula oleh beberapa hadis Nabi yang melarang aksi yang serupa.

Praktik politik uang dalam pemilihan umum, menurut Stokes dilakukan dengan carayang dikenal dengan *swing voters* yakni memberi uang kepada pendukung lawan yang lemah “iman” pilihannya. Sementara itu, Nichter berpandangan sebaliknya, partai justru membayar uang kepada pemilih mereka sendiri. Dia menyebutnya sebagai *turnout buying*. Anggapan dasar yang digunakan Stokes adalah pemilih setia itu basis konvensional. Andaikan tidak menemukan alokasi dan distribusi material, mereka bakal tetap memberikan sokongan pada partainya apa pun yang terjadi.³⁰

²⁷“Ternyata, Ustadz Abdul Somad Mengaku Telah Menang Sebelum Pilkada,” Seputartangsel.com, 2020.

²⁸(Zen, 2015: 525)

²⁹(Pahlevi & Amrullohi, 2019: 142)

³⁰Muhtadi, (2013: 45-46)

Penelitian tentang politik uang di Indonesia sudah beberapa kali dilakukan, salah satunya oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang mengukur tingkatan rasio politik uang dalam pemilihan kepala daerah, pengamatan itu dilakukan dengan populasi nasional di bulan Oktober 2005 serta Oktober 2010. Survei memakai metode penarikan sampel Multistage Random Sampling(MRS). Jumlah sampel sejumlah 1. 000 orang responden dengan tingkat kekeliruan sampel (sampling error) sebesar plus minus 4%. Hasil survei membuktikan khalayak yang melaporkan bakal menerima uang yang diberikan oleh calon hadapi eskalasi. Pada tahun 2005, sebesar 27, 5% khalayak melaporkan hendak menyambut duit yang diserahkan calon serta memilih calon yang memberi uang. Nilai ini naik jadi 37, 5% di tahun 2010. Begitu pula anggapan publik kalau politik uang bakal mempengaruhi pilihan atas calon, juga mengalami eskalasi dari 53, 9% di tahun 2005 jadi 63% di tahun 2010.³¹

Untuk menimalisir praktik politik uang pada pilkada serentak tahun 2020, UAS mengkampanyekan “tolak politik uang” pada simpatisan calon kepada daerah dan wakil kepala daerah yang didukungnya. Seperti pada pilkada Kota Medan, UAS menekankan agar masyarakat Medan terutama yang mendukung Akhyar-Salman menolak politik uang.

“Sadarkan pada jamaah, jika tak bisa bicara, *share* video ini. Orang yang mengambil duit haram, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dipaksanya kami mengambil, ambil duitnya jangan coblos orangnya, ambil duitnya coblosnya tetap Akhyar-Salman, nomor satu.”³²

Gambar 1

Ustadz Abdul Somad Saat Mengkampanyekan Pasangan Akhyar – Salman Secara Online



Sumber: Detik News

³¹(Zen, 2015: 529)

³²“Ustadz Abdul Somad Beri Pesan Menohok, Ajak Warga Tolak Politik Uang Dalam Pilkada Kota Medan” (Indonesia: Tribun Medan Tv, 2020).

Dukungan

Pemilihan umum ialah bentuk independensi warga serta kerasionalan orang buat memilih pemimpinnya. Hal ini mempunyai hubungan dengan penyusunan pemerintahan daerah selaku wujud kerasionalan masyarakat daerah yang direalisasikan lewat pemilihan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah dengan cara langsung. Tujuan diadakannya pilkada langsung ialah untuk membuat pemerintahan yang kokoh bersumber pada pilihan serta legitimasi dari masyarakat.³³

Budiarjo mengatakan bahwa pemilu adalah “proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepada bupati dan wali kota.”³⁴

Sebagai manifestasi pemilihan umum, pada tahun 2020 sedikitnya terdapat 270 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung³⁵ dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.³⁶

Dalam hubungannya dengan kajian ini, Ustadz Abdul Somad (UAS) sebagai salah seorang warga Negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2020. Partisipasi atau keterlibatan UAS salah satunya menjadi komunikator politik atau juru kampanye bagi beberapa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Seperti dimuat di beberapa media massa, UAS diketahui mendukung dan menjadi tim kampanye beberapa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,³⁷ di Riau, UAS terang terangan memberi dukungan kepada tiga pasangan calon yakni di Kota Dumai pasangan (Paisal - Amris), Kabupaten Rokan Hulu pasangan (Hapith - Erizal) dan Kabupaten Indragiri Hulu (Rizal Zamzami-Yoghi Susilo). Diapun ikut terjun untuk berkampanye. Selain di Riau, UAS juga mendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi (Erman Safar-Marfendi).³⁸ Sedangkan di Kota Medan, UAS

³³(Widodo, 2015: 683)

³⁴Mulyono (2019: 98)

³⁵Rayful Mudassir, “Ini Jadwal Lengkap Tahapan Pilkada Serentak 2020 Terbaru,” *bisnis.com*, 2020, <https://m.bisnis.com/amp/read/20200624/15/1257129/ini-jadwal-lengkap-tahapan-pilkada-serentak-2020-terbaru>.

³⁶Aim, “Daftar Lengkap 270 Pilkada Serentak 2020 Seluruh Indonesia, 7 Kabupaten Di Kalbar,” *TribunPontianak.co.id*, 2020, <https://pontianak.tribunnews.com/2019/06/23/daftar-lengkap-270-pilkada-serentak-2020-seluruh-indonesia-7-kabupaten-di-kalbar>.

³⁷Menurut Tanjung (2020)

³⁸Sikumbang, “Dampingi Cawalkot Bukittinggi, Ustaz Abdul Somad: Ini Bagian Pendidikan Umat.”

memberikan dukungan kepada Akhyar-Salman. “Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh. Terdapat tiga poin yang ingin saya sampaikan pada peluang ini. Sehebat-hebatnya, sehiruk-pikuknya kampanye saat ini tidak bisa di tempat alun-alun, tidak bisa di stadion. Maka tim Akhyar-Salman musti ketok pintu ke pintu, musti mampu mempengaruhi orang hingga tanggal 9 Desember, Rabu pagi musti mencoblos nomor 1, Akhyar-Salman,” ujar UAS.³⁹

Tabel 1
Dukungan Ustadz Abdul Somad Kepada
Peserta Pilkada Tahun 2020

No	Daerah	Nama Peserta Pilkada
1	Kota Dumai	Paisal - Amris
2	Kabupaten Rokan Hulu	Hapith - Erizal
3	Kabupaten Indragiri Hulu	Rizal Zamzami - Yoghi Susilo
4	Kota Bukit Tinggi	Erman Safar - Marfendi
5	Kota Medan	Akhyar - Salman

*Diolah dari berbagai sumber

Kontroversi Keterlibatan Ustadz Abdul Somad Pada Pilkada Tahun 2020

Setiap kali pemilihan umum digelar, beberapa ulama dan tokoh agama ikut menjadi juru kampanye para politisi dan kandidat atau pasangan calon (paslon) tertentu dan setiap kali pemilihan umum pula, keterlibatan mereka sebagai tim kampanyemengundang kontroversi dan perdebatan.

Salah satunya, ulama yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Ustadz Abdul Somad. Keterlibatannya sebagai juru kampanye beberapa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di beberapa daerah memantik perdebatan dan perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Ada yang suka, namun tidak sedikit juga yang memandang negatif.

Pengamat politik Universitas Riau, Tito Handoko menilai keterlibatan UAS sebagai juru kampanye salah satu paslon akan berdampak bagi UAS sendiri. Hal ini dikarenakan, saat mendukung calon tertentu, pasti ada pro kontra antara pengikut UAS. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan sikap dan pilihan UAS. “Saat dia memihak salah satu

³⁹“Pilkada Medan 2020, Ustad Abdul Somad Titip Pesan Untuk Warga,” JawaPos.com, 2020, <https://www.jawapos.com/nasional/politik/30/11/2020/pilkada-medan-2020-ustad-abdul-somad-titip-pesan-untuk-warga/>.

calon, pengikutnya pasti akan ada yang sepakat dan tidak sepakat. Artinya, ada pembelahan di situ. Itu sebabnya posisi ideal bagi UAS adalah tidak memihak kandidat manapun.”⁴⁰

Berbeda dengan Tito Handoka, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto justeru tidak mempermasalahkan keterlibatan UAS sebagai juru kampanye. Menurutnya hal itu merupakan hak politik setiap warga Negara. Yandri bahkan mengatakan tidak ada pemisahan antara ulama dan bukan ulama dalam politik, selama dilakukan sesuai dan taat pada perundang-undangan.

*“Orang jadi cawapres aja bisa ulama kok. Apalagi jadi timses. Ma’ruf Amin aja sukses jadi cawapres kan. Masa jadi timses aja nggak boleh. Tapi tetap menurut peraturan perundang-undangan. Ajakan nggak boleh hasut, provokasi memfitnah,” ucap Yandri.*⁴¹

Fenomena tim kampanye dari golongan malim serta tokoh agama ini telah jadi tren serta “menggurita” sesudah rontoknya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 yang menandai dibukanya kembali kran demokrasi di Indonesia setelah demikian lama “mati suri”⁴². Abdul Mu’nim menerangkan alam reformasi telah melahirkan banyak partai politik, baik yang beridentitas agama ataupun non-agama. Para tokoh agama, serta kalangan cendekiawan, mereka terjun aktif serta berasosiasi dengan partai politik, ada yang berkecimpung di Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional(PAN), Partai Persatuan Pembangunan(PPP), dan partai politik yang lain.⁴³

Oleh karena itu menurut penulis, jika mendirikan partai dan menjadi peserta pemilu saja tidak ada dilarang. Maka sebagai warga negara yang hak dan kewajibannya sama, ulama sah-sah saja untuk menjadi juru kampanye dan mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu peserta pemilu. Namun tentunya hal ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴⁰Febri Kurnia, “Jika Pilkada Tuntas, Ini Dampaknya Bagi UAS,” Gatra.com, 2020, <https://www.gatra.com/detail/news/497812/politik/jika-pilkada-tuntas-ini-dampaknya-bagi-uas>.

⁴¹Prasetyo Siran, “UAS Kampanyekan Paslon Akhyar-Salman, PAN: Tak Masalah, Banyak Kiai Juga Jadi Timses,” Realitakyat.com, 2020, <https://realitakyat.com/2020/12/01/uas-kampanyekan-paslon-akhyar-salman-pan-tak-masalah-banyak-kiai-juga-jadi-timses/>.

⁴²Sumanto Al Qurtuby, “Antara Politik Ulama Dan Ulama Politik,” dw.com, 2017, <https://www.dw.com/id/antara-politik-ulama-dan-ulama-politik/a-37440108>.

⁴³(Mahadi, 2015: 230-231)

Kesimpulan

Dari tiga macam komunitor politik, Ustadz Abdul Somad (UAS) masuk pada kategori ketiga, yaitu juru bicara sekaligus pemimpin pendapat. Karena tujuannya bukan untuk meraih jabatan, namun memberikan dukungan karena adanya kesamaan visi misi dan tujuan. UAS juga orang yang mempunyai kharismatik yang tinggi di tengah masyarakat, sehingga diyakini mampu menggerakkan masyarakat untuk menentukan pilihan politik dalam konstestasi politik pada Pilkada 2020.

Adapun pesan-pesan politik yang disampaikan oleh UAS pada Pilkada 2020 adalah sebagai berikut: a) Politik adalah bagian dari pendidikan umat, b) Politik merupakan sarana untuk mengaplikasikan dakwah, c) Tolak tekanan politik, d) Tolak politik uang.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Muhammad Qadaruddin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- . *Pengantar Ilmu Dakwah*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Aim. “Daftar Lengkap 270 Pilkada Serentak 2020 Seluruh Indonesia, 7 Kabupaten Di Kalbar.” *TribunPontianak.co.id*, 2020.
<https://pontianak.tribunnews.com/2019/06/23/daftar-lengkap-270-pilkada-serentak-2020-seluruh-indonesia-7-kabupaten-di-kalbar>.
- Alfaqi, Mifdal Zusron. “Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas.” *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2015): 111–16. <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5451/2120>.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori Dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- . *Pengantar Ilmu Komunikasi*. 2nd ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Fikri, Zainal. “Politik Islam Antara Dakwah Dan Orientasi Kekuasaan.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 13, no. 26 (2017): 55–60.
- Kompas.com. “Hasil Akhir Quick Count Pilkada Medan Oleh 3 Lembaga Survei,” 2020.
- Kurnia, Febri. “Jika Pilkada Tuntas, Ini Dampaknya Bagi UAS.” *Gatra.com*, 2020.
<https://www.gatra.com/detail/news/497812/politik/jika-pilkada-tuntas-ini-dampaknya-bagi-uas>.
- Mahadi, Ujang. “Komunikasi Politik Kiai Pada Kampanye Pemilu.” *Addin* 9, no. 2 (2015): 229–52. <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.614>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mudassir, Rayful. “Ini Jadwal Lengkap Tahapan Pilkada Serentak 2020 Terbaru.”
-

bisnis.com, 2020. <https://m.bisnis.com/amp/read/20200624/15/1257129/ini-jadwal-lengkap-tahapan-pilkada-serentak-2020-terbaru>.

- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien." *Jurnal Penelitian Politik* 10, no. 1 (2013): 41–58.
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/217>.
- Mulyono, Galih Puji & Fatoni, Rizal. "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia." *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2019): 97–107.
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrullohi. "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 1 (2019): 141–52.
- "Pentingnya Ekonomi Islam Dan Kontribusi Tazkia." Indonesia: Tazkia Tv, 2019.
- JawaPos.com. "Pilkada Medan 2020, Ustad Abdul Somad Titip Pesan Untuk Warga," 2020. <https://www.jawapos.com/nasional/politik/30/11/2020/pilkada-medan-2020-ustad-abdul-somad-titip-pesan-untuk-warga/>.
- Qurtuby, Sumanto Al. "Antara Politik Ulama Dan Ulama Politik." *dw.com*, 2017.
<https://www.dw.com/id/antara-politik-ulama-dan-ulama-politik/a-37440108>.
- Shahreza, Mirza. "Pengertian Komunikasi Politik." *INA-Rxiv*, 2018, 1–33.
https://www.researchgate.net/publication/326144065_Ethics_On_Political_Communication.
- Siagian, Haidir Fitra. *Komunikasi Politik: Posisi Ulama Sebagai Komunikator Politik*. Makassar: Alauddin University Press, n.d.
- Sikumbang, Wahyu. "Dampangi Cawalkot Bukittinggi, Ustad Abdul Somad: Ini Bagian Pendidikan Umat." *INewsSumbar.id*, 2020.
<https://sumbar.inews.id/berita/dampingi-cawalkot-bukittinggi-ustad-abdul-somad-ini-bagian-pendidikan-umat/all>.
- Siran, Prasetyo. "UAS Kampanyekan Paslon Akhyar-Salman, PAN: Tak Masalah, Banyak Kiai Juga Jadi Timses." *Realitarakyat.com*, 2020.
<https://realitarakyat.com/2020/12/01/uas-kampanyekan-paslon-akhyar-salman-pan-tak-masalah-banyak-kiai-juga-jadi-timses/>.
- Sofyan, M. Ali, Puji Laksono, and Muhammad Chabibi. "Strategi Komunikasi Politik Ulama Nahdlatul Wathan Pancor Dalam Membentuk Opini Publik Pilkada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019" 5, no. 2 (2020): 57–73.
- Susanto, Eko Harry. "Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Kajian Komunikasi* 1, no. 2 (2013): 163–72. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.6>.
- Tanjung, Banda Haruddin. "Ustadz Abdul Somad Paparkan Alasan 'Turun Gunung' Dukung Calon Di Pilkada." *okenewz*, 2020.
<https://news.okezone.com/read/2020/12/10/340/2325269/ustadz-abdul-somad->

paparkan-alasan-turun-gunung-dukung-calon-di-pilkada.

Seputartangsel.com. "Ternyata, Ustadz Abdul Somad Mengaku Telah Menang Sebelum Pilkada," 2020.

"Ustaz Abdul Somad Beri Pesan Menohok, Ajak Warga Tolak Politik Uang Dalam Pilkada Kota Medan." Indonesia: Tribun Medan Tv, 2020.

Widodo, Wahyu. "Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila." *Civis* 5, no. 1 (2015): 679–91.
<http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/629>.

Zawawi, Abdullah. "Politik Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ummul Qura* V, no. 1 (2015): 85–100.

Zen, Hedi Riza. "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah." *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 525–40.